Tindak Wicara Pornografi

Herminie Soemitro

ABSTRACT This paper suggests the readers to be critical in their concern for the problem of pornography. It seems clear that pornography is a moral problem, but a simple argument from Traditional Philosophy of Language has shown that pornography does not have any meaning. This kind of argument is named Meta-ethics. However, pornography is a phenomenon in our society and it does happened. On the one side, we should resist the temptation of scrutinizing pornography as a moral problem. On the other side, pornography has risen a big worry in our society. In resisting the temptation we found a better theory, so that we are able to uncover the origin of pornography. John Langshaw Austin has saved some study of impossible phenomena including pornography by his theory of Speech Act. The result of the study is that pornography is made possible in social relation and it is about Power.

KATA KUNCI Pornografi, tindak wicara, filsafat bahasa, relasi sosial, kekuasaan.

Pornografi bukan masalah moral. Pernyataan itu akan mengundang berbagai tanggapan dan menuntut penjelasan yang panjang. Mengapa demikian? Bukankah selama ini pornografi selalu dipersepsikan sebagai masalah moral dan menjadi kekhawatiran para orangtua—kekhawatiran para orangtua jika anak remaja mereka terjangkiti demam pornografi; jika anak enggan belajar, malahan secara sembunyi-sembunyi menyimpan majalah porno atau menonton video porno bersama teman-teman mereka. Apakah memang benar pornografi itu merusak moral generasi muda atau justru memberikan penerangan dan dengan demikian menanggapi rasa ingin tahu para kawula muda secara wajar-wajar saja? Benarkah demikian?

Jika pornografi bukan masalah moral, lalu mengapa media massa heboh memberitakan proses dan hasil penyapuan produk pornografi cetak dan elektronik oleh aparat kepolisian. Kehebohan tidak perlu terjadi jika dapat diterima bahwa merupakan kewajaran apabila aparat kepolisian melakukan penyitaan sebagai sanksi atas larangan pornografi. Jika larangan pornografi telah diundangkan dalam peraturan, tidak perlu terjadi protes para pengedar pornografi atas perampasan barang dagangan mereka. Bukankah mereka, para penjual produk pornografi, berhak mencari nafkah dengan berdagang? Bukankah pembeli produk pornografi membelinya dengan suka rela? Apabila masyarakat tidak menghendaki peredaran produk pornografi, bukankah cukup bila diboikot saja dan tidak usah dibeli sehingga peredaran produk pornografi akan berhenti dengan sendirinya? Yang terjadi justru peningkatan transaksi (jual-beli) dan

peredarannya walaupun dilakukan tersembunyi. Transaksi tersembunyi menandakan bahwa masyarakat mengetahui atau, setidaknya, penikmat pornografi telah melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran atas peraturan yang telah diundangkan maupun pelanggaran moral masyarakat. Walaupun pengetahuan atau perasaan mereka itu semu dan belum diselidiki kebenarannya, mereka tetap berminat untuk membeli, menyimpan, dan menikmatinya sebagai konsumen pornografi. Apakah larangan terhadap pornografi telah diundangkan? Jika sudah, apakah memang perlu?

Kasus melonjaknya penjualan keping VCD porno, walaupun dilakukan secara diam-diam, dengan aktor mahasiswa suatu perguruan tinggi di Bandung menunjukkan bahwa peraturan tentang pornografi belum diundangkan dengan memadai. Dalam masyarakat terjadi perdebatan dan perselisihan pendapat. Beberapa pihak yang merasa dirugikan mengajukan tuntutan ke pengadilan, tetapi pengadilan belum dapat mengacu pada peraturan yang mengakomodasikan kepentingan masyarakat atau pihak terkait. Kalau pemerintah merasa perlu melindungi kepentingan masyarakat, tentunya harus ada peraturan. Untuk menentukan peraturan tentang pornografi, perlu diselidiki terlebih dahulu hak-hak berbagai pihak yang bersangkutan dengan pornografi. Hal itu perlu dilakukan agar peraturan dapat menjamin keadilan dan tidak ada pelanggaran hak, agar tidak ada pihak dalam masyarakat yang dalam peraturan saja sudah menjadi korban. Kalau memang masalah seputar pornografi telah diundangkan dalam peraturan, dan pornografi dilarang, polisi berhak menyita produk-produk pornografi tersebut. Masyarakat luas yang kecewa karena tidak dapat menuntut aktor dalam VCD dimaksud sebenarnya telah menjatuhkan sanksi sosial yang besar dan aktor itu menjadi korban. Arah tuntutan seharusnya kepada produser dan pengedar. Benarkah demikian? Bukankah hal itu bertentangan dengan masalah kebebasan? Sebenarnya pelarangan pornografi tidak akan efektif. Akses dan penggunaan internet yang sangat bebas merupakan batu ujian. Tayangan pornografi melalui internet di luar kendali pihak yang tidak setuju. Pemerintah, orangtua, guru, dan polisi tidak berdaya, bahkan sensor pun tidak dapat dilakukan. Semua orang tanpa pembatasan umur dapat mengakses internet, kapan saja.

MASALAH PORNOGRAFI

Pertanyaan-pertanyaan yang muncul perlu ditanggapi satu persatu. Perlu diurai perihalnya yang menjadi masalah dalam pornografi. Masukan dari rekan peneliti sangatlah berharga, di samping teori-teori yang telah masyhur di bidang pornografi. Saya merasa bahwa masalah pornografi akan menjadi jelas jika mendapat perhatian dan diteliti melalui disiplin ilmu filsafat.

Ada cara sederhana untuk memulainya. Terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang muncul seputar masalah pornografi didaftar. Dari daftar itu dipilih prioritas urgensinya, kemudian apabila masih memungkinkan

untuk membahas masalah yang tertinggal akan dilanjutkan atau direkomendasikan pada penelitian berikutnya. Selain inventarisasi masalah, perlu juga diketahui hakikat dan sifat-sifat pornografi. Barangkali saja permasalahan sekitar pornografi akan tersingkir dengan sendirinya setelah diketahui hakikat dan sifatnya, apalagi jika dapat diketahui fungsinya.

Dari berbagai masalah pornografi yang tercermin pada pertanyaan-pertanyaan di atas, perlu dipilih pertanyaan yang paling penting. Pertanyaan itu adalah perlukah pornografi dilarang. Untuk menyelidiki perlu tidaknya pornografi dilarang, diperlukan pembahasan tentang kebebasan, hak-hak masyarakat dan warga negara, serta masalah keadilan. Selain itu, pertanyaan paling penting di atas secara implisit mengandung pertanyaan yang tidak kalah pentingnya dan merupakan prasyarat dalam pembahasan, yakni apakah pornografi itu.

Dalam tulisan ini saya tidak berpretensi untuk memberikan solusi ataupun jawaban terhadap pertanyaan perlu tidaknya pornografi dilarang. Jawaban akan terbuka bagi penilaian pembaca ataupun khalayak karena solusi yang sebenarnya baru dapat ditentukan oleh masyarakat pendukung terjadinya fenomena pornografi. Sumbangan yang dapat dijanjikan oleh penelitian ini adalah pengenalan hakikat pornografi dengan mendudukan pornografi dalam sorotan filsafat bahasa. Walaupun jawaban langsung terhadap larangan pornografi tidak diberikan, peneliti akan membahas masalah hak yang berkaitan dengan pornografi. Dengan paparan kritis tentang argumen-argumen yang diajukan berbagai pihak berkepentingan, diharapkan publik (khalayak) dapat memperoleh dasar pertimbangan diizinkannya atau dilarangnya pornografi.

Tulisan ini merupakan laporan hasil penelitian tentang pornografi yang dilakukan menurut disiplin ilmu filsafat. Dalam disiplin ilmu filsafat ditawarkan banyak sekali metode. Metode yang umum dan paling sesuai dengan karakteristik kajian filosofis adalah metode refleksi kritis, namun pemilihan metode ini mengandaikan adanya penelitian pendahuluan yang bersifat lebih deskriptif. Oleh karena itu, filsafat sering dikatakan sebagai ilmu tingkat kedua, yaitu merenungkan kembali hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan berbagai disiplin ilmu lain tentang objek yang sama. Disiplin ilmu lain mendekati objeknya secara sektoral karena tuntutan spesialisasi kekhususan agar hasilnya intensif dan mendalam. Menjadi tugas filsafat untuk merenungkan kembali hasil-hasil penelitian yang sektoral tersebut secara refleksif. *Refleksi*, menurut asal katanya, adalah 'membungkuk atas'. Melalui metode refleksi, diharapkan hasil yang integral dan komprehensif menyeluruh. Melalui metode refleksi pula dapat diharapkan pengkajian atas aspek-aspek yang luput diperhatikan oleh ilmu lain sehingga metode refleksi selalu harus kritis karena membuka kembali pertanyaan terhadap perolehan yang telah merupakan hasil dari ilmu lain. Selain itu, metode refleksi sering membongkar kembali asumsi dasar yang telah disepakati dan telah tidak dipersoalkan lagi dalam disiplin ilmu lain. Refleksi kritis dapat saja terjadi—bukan melulu terhadap perolehan dari disiplin ilmu lain—terhadap pemikiran filsuf yang telah terkenal sebelumnya. Dalam hal yang demikian dilakukan analisis logis terhadap argumen-argumen

yang sebenarnya telah disusun secara runtut dan sangat apik oleh filsuf terkenal itu.

Pemilihan metode yang sesuai untuk suatu objek penelitian filsafat juga dapat dimudahkan apabila terlebih dahulu ditetapkan penempatan masalah dalam sistematik filsafat. Apabila persepsi awam memandang pornografi sebagai masalah moral ataupun tindak kriminal, tentunya penempatan yang paling sesuai adalah pada bidang aksiologi, khususnya filsafat moral atau etika. Dalam hal ini saya menjumpai kesukaran.

Pertama, memang etika dapat dipergunakan untuk merefleksikan masalah hukum atau sebutannya dalam filsafat “mengkritik legalisme”. Akan tetapi, pornografi itu sendiri belum terbukti sebagai tindak kriminal. Menurut hukum positif, tindak kriminal harus dapat diadili apabila telah diundangkan peraturan mengenai halnya dan tindak kriminal harus berupa tindakan empiris atau berupa perilaku positif, dalam arti dapat diamati dan dapat terlihat akibatnya. Dengan demikian, kurang tepat apabila pornografi dibahas melalui etika karena anggapan bahwa pornografi itu merupakan tindak kriminal.

Kedua, pornografi memang bukan masalah moral. Kecemasan masyarakat terhadap pornografi lebih pada dampak yang mungkin ditimbulkannya, seperti tindak kekerasan atau pelecehan seksual terhadap orang tertentu, tetapi sejauh ini belum dilakukan penelitian yang dapat memperlihatkan hubungan langsung antara konsumsi pornografi dan tindak kekerasan.

Ketiga, oleh kecenderungan filsafat bahasa—dengan tidak menempatkan masalah pornografi pada filsafat moral ataupun etika—dilakukan tindak penyelamatan. Filsafat bahasa tradisional (positivisme logis) telah menghabisi etika dan menghasilkan meta-etika. Filsafat bahasa tradisional membedakan dengan tegas bahasa semantik yang bermakna dari bahasa pragmatik dalam penggunaan sehari-hari. Pembahasan filsafat yang akademik semestinya mengarahkan perhatiannya pada objek kajian dengan bahasa semantik yang bermakna. Maksudnya, melalui analisis bahasa, disingkirkan kalimat dan proposisi yang tidak bermakna, yang tidak dapat diuji kebenarannya. Pornografi jelas-jelas tidak termasuk dalam bahasa semantik. Apabila dilakukan analisis bahasa dan disingkirkan segala proposisi tidak bermakna dari pornografi, dikhawatirkan tidak ada lagi yang tertinggal. Serangan dari filsafat bahasa tradisional mendapat tanggapan dengan munculnya filsafat bahasa sehari-hari. Filsafat bahasa sehari-hari dirintis oleh Wittgenstein melalui teorinya, *Language Games*, yang melawan teorinya terdahulu, *Picture Theory*. Kemudian, inspirasi dalam *Language Games* dilanjutkan oleh J.L. Austin dengan teorinya tentang *Speech Act* (Mustansyir 2001: 109–112). Titik tonggak perubahan dan perkembangan itu memberi harapan baru bagi banyak hal yang sebelumnya tidak mungkin dibahas, antara lain pornografi ini.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dipilihlah metode refleksi kritis dan analisis logis serta metode analisa bahasa dalam penelitian tentang pornografi ini.

DEFINISI DAN PEMBATASAN

Seharusnya kedua pertanyaan di muka yang demikian penting, yang telah diformulasikan tersebut, diupayakan dijawab dan diberikan solusi pemecahan masalahnya – untuk itu tulisan yang merupakan hasil penelitian ini ditulis. Karena saya menyadari keterbatasan dalam hal waktu dan pendekatan, pembahasan diarahkan pada hakikat pornografi dan penyelidikan argumen berbagai pihak yang berkepentingan dengan masalah pornografi.

Definisi *pornografi* yang diperoleh melalui *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1997: 782) adalah '(1) penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi; (2) bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.' Penulis ingin mengajukan usulan definisi *pornografi* sebagai berikut. *Pornografi* adalah 'penggambaran secara eksplisit perilaku seksual, baik melalui ujaran verbal maupun bahasa tubuh, yang berupa kata-kata ataupun gambar, dengan tujuan membangkitkan nafsu berahi semata'. Media yang digunakan dapat berupa media cetak atau elektronik. Kedua definisi tersebut dapat membantu, tetapi belum cukup memberikan landasan bagi pembahasan masalah hak dan masalah keadilan yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi keputusan dilarang atau diizinkan pornografi.

PORNOGRAFI DALAM SOROTAN FILSAFAT BAHASA.

Merujuk pada definisi yang telah saya tuliskan di muka, bahwa pornografi dapat berupa tulisan atau lukisan, ujaran verbal (kata), ataupun gambar yang merupakan bahasa tubuh, saya menganggap masalah pornografi dapat ditempatkan dalam filsafat bahasa untuk mengenali hakikatnya.

Secara historis, dari sejarah perkembangan pemikiran, filsafat bahasa dapat diklasifikasikan ke dalam tiga aliran. Aliran pemikiran tersebut adalah atomisme logis, positivisme logis, dan filsafat bahasa biasa. Kedua aliran pertama sangat berjasa menjernihkan begitu banyak persoalan filsafat. Melalui analisis bahasa, persoalan yang semula terlihat begitu rumit dan sangat canggih menjadi jelas dan sederhana. Melalui formulasi ulang pertanyaan-pertanyaan filsafat, terbuka jalan pemecahan masalah yang sedang dibahas. Namun, karena terlalu tegas dalam memilih objek yang logis dan teramati dari objek lainnya, banyak aspek lain dalam realitas yang luput dari pembahasan. Realitas hidup sehari-hari tidak kalah penting dari masalah akademik-ilmiah melulu. Karena kebutuhan untuk memperoleh sarana dalam membahas realitas yang pragmatis dalam kehidupan sehari-hari, muncullah filsafat bahasa biasa.

Filsafat bahasa biasa dipelopori oleh Ludwig Wittgenstein. Semula ia sependapat dengan Bertrand Russell dan mengajukan konsep atomisme logis. Konsep itu menunjukkan hubungan logis kenyataan-kenyataan terkecil (atomis) dunia eksternal dengan unsur-unsur bahasa dan dunia internal subjektif. Oleh karena itu, teori ini dikenal dengan *Picture Theory*,

yakni bahwa bahasa menggambarkan dunia. Ada kesesuaian logis yang menghubungkan dunia dengan bahasa. Namun dengan teori ini, banyak kenyataan yang tak terungkap melalui bahasa. Karena itu, Wittgenstein mengajukan teori baru: yang penting bukan bagaimana bahasa menggambarkan dunia, tetapi bagaimana bahasa dipergunakan untuk keperluan memahami dunia, bahkan bahasa dapat menciptakan realitas. Untuk dapat digunakan sesuai keperluan, ada berbagai aturan bahasa yang dapat digunakan. Teori Wittgenstein yang baru disebut *Language Games*. *Language Games* sangat berbeda, dari *Picture Theory*. Oleh karena itu, kedua teori sering dibedakan dengan diberi sebutan Wittgenstein I dan Wittgenstein II (Muntasyir 2001: 60).

Perhatian terhadap kenyataan pragmatik sehari-hari, yang telah ditunjukkan Wittgenstein II, memberikan inspirasi lebih lanjut pada John Langshaw Austin. Dalam bukunya *How To Do Things With Words*, Austin (1962: 139) berpendapat bahwa berkata atau mengeluarkan ujaran berarti sama dengan melakukan tindakan. Pendapat ini sangat berharga sebagai sarana untuk menelaah hakikat pornografi. Pornografi terwujud dalam bentuk kata dan gambar. Oleh karena penjelasan dan uraian Austin terarah pada bentuk kata, saya mengusulkan untuk memperluas arti *kata* (sebagai bahasa verbal) sehingga mencakup juga *gambar* (sebagai bahasa tubuh).

Austin membedakan jenis ucapan antara ucapan konstatif dan ucapan performatif. Sementara ucapan konstatif mencari makna dengan menentukan benar atau salah melalui pengalaman empiris dan historis, ucapan performatif ditentukan oleh konteks dan latar belakang ucapan. Hasil penentuan terhadap ucapan performatif adalah efektif atau tidak efektif bekerjanya ucapan. Efektivitas bergantung pada konteks ucapan dan konteks latar belakang agen-agen pengucapan (Austin 1962: 101).

Secara lebih cermat Austin menyelidiki jenis ucapan performatif. Ucapan performatif mengarah pada tesisnya yang terkenal tentang tindak wicara (*speech act*). Tesis Austin tentang tindak wicara adalah bahwa dengan mengucapkan sesuatu secara sengaja dan bertujuan kita telah bertindak sesuatu. Dari hasil penyelidikannya lebih lanjut, ia membedakan sekaligus menghubungkan kaitan di antara pemilahan dalam tindak wicara. Tindak wicara terpilahkan ke dalam tindakan lokusi, tindakan ilokusi, dan tindakan perlokusi (Austin 1962: 109). Di antara ketiga pilahan ini, tindakan perlokusi paling sesuai menggambarkan hakikat pornografi¹.

Pendapat utama Austin tentang *berkata* dan *bertindak* sekaligus – tindak wicara – oleh Mustansyir disebut dengan istilah *tindakan bahasa*. Akan tetapi, saya ingin mengusulkan digunakannya istilah *tindak wicara* dalam mengadaptasi konsep *speech act* terhadap upaya memahami pornografi. Istilah *tindak wicara* lebih mencerminkan maksud sebenarnya daripada istilah *tindakan bahasa*. Alasannya adalah pengertian bahasa lebih luas daripada wicara. Bahasa dapat mencakup simbol-simbol metafisik yang

¹ Ucapan terima kasih saya sampaikan secara khusus kepada Rae Langton yang telah bersedia berdiskusi dengan saya tentang masalah pornografi.

abstrak, bahkan dapat mencakup cara berada (*being*). Padahal, keperluan membahas objek pornografi lebih mengarah pada kehidupan sehari-hari yang sifatnya konkret, secara spesifik mengacu pada ujaran dan ekspresi. Dengan demikian, istilah *tindak wicara* lebih tepat.

Di samping alasan tersebut, *tindak wicara* juga dapat lebih mencerminkan berlangsungnya komunikasi satu arah, dari penutur kepada petutur dengan tujuan yang telah dirancang secara cermat oleh penutur untuk memperoleh efek yang diinginkan. Komunikasi satu arah *tindak wicara* berbeda dengan konsep *tindakan komunikatif* Habermas. Selain berlangsung komunikasi berbagai arah timbal-balik secara partisipatif, tindakan komunikatif Habermas bertujuan mencari kesepakatan, kesepahaman, dan penentuan tujuan bersama. Untuk tujuan tindakan komunikatif Habermas diperlukan persyaratan rasionalitas agen-agen komunikasi (penutur dan petutur). Berbeda halnya dalam *tindak wicara*, sarana rasionalitas dalam berkomunikasi tidak diperhatikan. *Tindak wicara* secara spesifik menunjuk pada ujaran dan tuturan manusia (aspek biologis dan psikologis) dan ini sesuai untuk pornografi. Dalam konteks pornografi yang lebih pragmatis (sehari-hari), lebih konkret dari pada simbolik-abstrak, penggunaan istilah *tindak wicara* lebih tepat dari pada penggunaan istilah *tindakan bahasa*.

Karakteristik *tindak wicara* sangat tepat dikenakan pada fenomena pornografi. Pornografi adalah paparan yang telah dirancang terlebih dahulu secara sepihak oleh penutur atau agen pertama untuk mencapai tujuan yang juga telah ditetapkan oleh agen pertama. Efek yang diinginkan dari ujaran dan tuturan bersifat khas, yaitu bangkitnya nafsu seks agen kedua atau ketiga yang menjadi sasaran tuturan. Proses dan arah komunikasi berlangsung sepihak, dari perancang pornografi kepada konsumen. Efek yang ditimbulkannya sangat nyata sehingga dengan menyampaikan tuturan, sudah dilaksanakan tindakan. Dari arah komunikasi yang sepihak dan dari efek yang ditimbulkannya, secara inheren—pada pornografi itu sendiri—tersirat kandungan hierarki kekuasaan (*power*). Pornografi adalah kekuasaan dan subordinasi, yang mencerminkan ketaksetaraan dalam relasi sosial.

Ketaksetaraan atau hierarki kekuasaan secara vertikal dalam pornografi, menjadi senjata yang dipergunakan sebaik-baiknya oleh para filsuf feminis dalam beradu argumen. Filsuf-filsuf feminis membentuk barisan menggalang sikap antipornografi, melawan filsuf kondang Ronald Dworkin yang bersikap permisif terhadap pornografi. Pembahasan pornografi dan perang argumen berlangsung antara pihak yang bersikap antipornografi dan pihak yang mendukung pornografi. Masing-masing merujuk pada konsep kunci, yakni hak, kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.

HAK SIAPA, KEBEBASAN SIAPA, DAN SIAPA YANG MERUGI

Pada bagian ini penulis hendak memaparkan argumen-argumen yang digunakan oleh pihak-pihak yang berdebat tentang masalah pornografi. Perdebatan tentang pelarangan atau pengizinan pornografi dapat direntang dalam spektrum pro- dan kontra- yang berlangsung. Spektrum tersebut

akan terlihat jelas warnanya apabila terlebih dahulu dilakukan pengelompokan. Kelompok pertama adalah kelompok konservatif, yang menentang diizinkan pornografi. Kelompok kedua adalah Dworkinian, yang adalah kelompok cendekiawan yang mendapat pengaruh kuat dari seorang filsuf yang bernama Ronald Dworkin. Berdasarkan teori politik liberal dan kesetaraan, Dworkinian mendukung diizinkan secara bebas pembuatan, pengedaran, dan penggunaan pornografi. Tanpa diduga oleh kelompok kedua (Dworkinian), argumen kebebasan, hak, dan kesetaraan — yang menjadi andalan propornografi — digunakan untuk menentang dan membalik sikap terhadap pornografi oleh barisan pembela kelompok terabaikan, yaitu perempuan.

Penentang pornografi paling awal adalah kelompok konservatif. Sesuai dengan kecenderungan konservatisme untuk mempertahankan nilai-nilai dan norma masyarakat, kelompok ini mendasarkan sikap mereka pada penentangan terhadap pornografi, pada kekhawatiran bahwa pornografi merusak moral masyarakat. Kekhawatiran itu dapat dipahami mengingat bahwa pornografi merupakan fenomena masyarakat modern. Dampak modernisasi sudah ditandai mempunyai potensi menggoyahkan sendi-sendi kebudayaan, yakni merusak nilai-nilai moral.

Modernisasi dengan teknologinya telah memungkinkan pemaparan, perekaman, penggandaan, dan penyebarluasan kegiatan seksual manusia melalui pornografi. Kegiatan seksual manusia sebenarnya bersifat alami, wajar, dan sehat. Menurut hakikatnya, seksualitas yang sehat merupakan ungkapan cinta kasih, ekspresi spontan, tanpa pamrih, tanpa rekayasa antara sepasang kekasih. Karena terjadi di antara sepasang kekasih, tentunya kegiatan seksual berlangsung secara pribadi. Namun, apa yang terjadi pada pornografi? Pornografi bukanlah kegiatan spontan yang didorong oleh motivasi kasih sayang, melainkan motivasi lain. Motivasi tersebut mungkin uang, keuntungan, atau ketenaran. Pembuatan pornografi jelas dirancang dan direkayasa untuk tujuan membangkitkan nafsu berahi semata pada khalayak konsumen, sementara seksualitas merupakan ungkapan kasih sayang yang spontan dan tulus (*sincerity*). Pelaku atau aktor pornografi hanyalah mengikuti skenario dan/atau arahan sutradara, memaparkan pada khalayak (publik) secara eksplisit kegiatan manusia yang seharusnya berlangsung secara pribadi. Pelaku atau aktor pornografi direduksi dalam hal martabat manusiawinya, dari subjek menjadi sekadar objek dalam cerita, ujaran atau gambar postur tubuhnya. Keutuhan manusia sebagai subjek yang berkesadaran telah terfragmentasi pada sekadar tubuh, bahkan potongan bagian tubuh manusia.

Karakter khas pada seksualitas manusia, yaitu kespontanan, ketulusan, kepribadian, dan ketakpamrihan, bertentangan dengan karakter pornografi yang penuh rekayasa, akting, pura-pura, publikasi, serta demi pencapaian tujuan lain selain kegiatan itu sendiri. Pornografi dapat dituduh melangsungkan proses dehumanisasi karena telah melepaskan karakter manusiawi yang baik dari seksualitas. Terjadinya dehumanisasi dalam pornografi dan kerusakan nilai-nilai moral oleh pornografi yang merupakan

bagian fenomena masyarakat modern adalah kekuatan argumen bagi kelompok konservatif. Modernisasi memang mempunyai kecenderungan mereduksi manusia.

Argumen kedua bagi kelompok konservatif, yakni bahwa pornografi memberikan inspirasi dilakukannya tindak kriminal dan kekerasan seksual dalam masyarakat, tampaknya kurang kuat karena belum pernah ada penelitian yang menunjukkan adanya hubungan langsung secara signifikan. Walaupun demikian, argumen ini patut dipertimbangkan. Kalau memang pornografi berdampak pada peningkatan tindak kriminal dan tindak kekerasan, pornografi harus dilarang.

Argumen ketiga adalah konsumsi pornografi memalukan. Oleh karena memalukan, hal-hal yang pornografis dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan karena sembunyi-sembunyi memerlukan penyisihan waktu secara khusus. Penyisihan waktu demikian dapat kontraproduktif, misalnya anak yang membolos sekolah dan pegawai yang mengoperasikan komputer akan mencuri akses ke situs porno dan sebagainya. Ketiga argumen konservatif selalu mengacu pada kerusakan moral akibat pornografi. Akan tetapi, apakah sebenarnya pornografi itu? Kalau pornografi merupakan salah satu bentuk ekspresi, bukankah pornografi adalah kebebasan yang tidak dapat dilarang?

Teori politik liberal berada pada kubu yang berlawanan dengan konservatisme. Filsuf Ronald Dworkin mengutarakan pandangan tentang tugas terpenting suatu pemerintahan. Atas tuntutan kebebasan, pemerintahan seyogianya sesedikit mungkin ikut campur dalam urusan individu karena individu memiliki kebebasan untuk menentukan pandangan hidupnya dan bagaimana seharusnya hidupnya dijalani. Hal demikian bersangkutan dengan masalah nilai-nilai. Jika masyarakat menganggap bahwa pornografi tidak berakibat buruk, atau bahkan bukan sesuatu yang buruk, tidak ada alasan pemerintah melarang pornografi. Kebebasan individual ini mengandung potensi adanya konflik dan bila ini terjadi, barulah pemerintah turun tangan. Tugas terpenting pemerintah adalah menjamin keadilan dan kesetaraan, kesetaraan dalam memperlakukan individu di bawah pemerintahannya. Kesetaraan itu meliputi hak yang sama untuk mendapat distribusi kebutuhan hidup dan mendapat akses terhadap sumber daya strategis dan hak untuk mendapat sikap penghormatan yang sama atas pandangan hidup dan sistem nilai perorangan atau kelompok. Dengan demikian, pemerintah tidak berhak menentukan apa yang baik dan apa yang benar bagi individu ataupun bagi kelompok dalam masyarakat. Tugas pemerintah adalah menjamin tidak adanya pelanggaran hak yang merugikan orang atau suatu kelompok dalam masyarakat. Berdasarkan teori liberal itu, kelompok Dworkinian menyerukan kebebasan pornograf, baik pengizinan produksi maupun konsumsinya. Atas kekhawatiran pengaruh pornografi yang dapat merusak moral masyarakat, Dworkinian mengembalikan hal ini pada penentuan pendapat oleh masyarakat sendiri.

Penentuan pendapat oleh masyarakat liberal tentang pornografi dapat diantisipasi akan terentang antara argumen utilitarian dan argumen ideal. Argumen utilitarian akan mencari petunjuk mengenai hal-hal apakah yang membuat masyarakat menjadi senang dan bahagia, lalu menjumlah pada pendapat mayoritas. Di sini ada peluang dirugikannya kelompok minoritas, yakni hak menentukan pandangan hidup dan norma yang baik dapat terkalahkan oleh suara mayoritas. Di pihak lain, argumen ideal memberi peluang pada penguasa untuk menentukan hidup yang baik secara meritokrat. Penentuan diserahkan pada sekelompok orang pilihan (pakar) yang dianggap ahli menentukan tujuan hidup orang banyak. Kesimpulannya, kelompok Dworkinian biasanya mendukung pengizinan pornografi dan kadang-kadang disertai catatan pembatasan usia konsumen dan penyensoran.

Argumen kebebasan yang menjadi andalan kelompok Dworkinian dicermati lebih lanjut oleh kelompok yang memberikan perhatian secara khusus pada orang-orang tersisih yang dalam kenyataan mempunyai potensi untuk dirugikan haknya. Argumen ini disusun oleh kaum perempuan dalam barisan dengan panji feminisme. Walaupun feminisme sendiri beraneka ragam pendapat, gambaran umum yang diperoleh dari aspirasi yang disuarakan adalah antipornografi. Yang menarik dan patut disimak adalah penggunaan konsep yang sama dengan kelompok Dworkinian, yakni konsep kebebasan, kesetaraan, dan penentuan nilai kehidupan, tetapi dengan kesimpulan yang justru berbeda. Feminisme pada umumnya antipornografi.

Pembalikan argumen dapat dicatat sebagai berikut.

Pertama, pornografi sebagai ekspresi adalah kebebasan manusia dan individu untuk memproduksi maupun mengonsumsi. Namun, ada kelompok atau individu lain yang dirugikan dengan kebebasan itu. Pemaparan eksplisit, khususnya dengan obyek perempuan, telah merendahkan martabat perempuan. Perempuan diobjektivasi. Secara lebih khusus tubuh perempuan dijadikan objek. Objektivasi mengandaikan (memprasyaratkan) adanya kekuasaan dan ketidaksetaraan dalam relasi sosial. Tubuh perempuan sebagai objek pornografi telah direduksi menjadi objek dan komoditas gambar dan kata. Ada yang mengatakan bahwa perempuan yang dijadikan objek pornografi sebenarnya mempunyai kecenderungan untuk bangga dan ingin memamerkan tubuhnya. Akan tetapi, menjadikan tubuh sebagai konsumsi publik dan pameran bukanlah pilihan dalam masyarakat yang terjebak kemiskinan atau terancam kesejahteraannya. Profesi sebagai model porno adalah keterpaksaan karena kebutuhan ekonomis.

Kedua, bila memang ada akibat negatif pornografi terhadap perilaku tindak kekerasan, khususnya perkosaan, perempuanlah yang besar potensinya menjadi korban. Hal ini tentu disertai catatan bahwa laki-laki dan perempuan berbeda secara biopsikis. Walaupun demikian, secara legal dan kultural laki-laki dan perempuan seharusnya mempunyai kesetaraan untuk memperoleh perlindungan, perlakuan, dan penghormatan dalam

masyarakat. Menjadi tugas pemerintahlah melindungi dan menjamin kesetaraan dan hak tersebut. Dalam rangka itulah, pornografi harus dilarang. Perluasan acuan "perempuan" sebagai korban diusulkan di sini. Siapa pun yang berpotensi menjadi korban dalam pornografi harus mendapatkan perlindungan walaupun korban itu berjenis kelamin laki-laki.

Ketiga, kelompok minoritas dalam masyarakat liberal dapat kalah dalam penentuan pendapat apakah pornografi patut dilarang. Kelompok tertentu dalam masyarakat dapat mempunyai prinsip yang berbeda dari mayoritas, misalnya nilai-nilai agama yang menjadi pandangan hidup kelompok minoritas mengharuskan penutupan aurat dari pandangan publik. Pornografi akan melecehkan nilai-nilai agama seperti itu. Secara analogis, konsumen akan mempunyai asosiasi antara objek gambar yang dilihat dengan person nyata dalam realitas. Jelas hal ini merugikan karena ada hak orang atau kelompok yang dilanggar apabila pornografi dibebaskan. Argumen jaminan-hak bersifat lebih prinsipil dari pada argumen utilitarian pendapat mayoritas. Argumen prinsip harus dimenangkan walaupun mayoritas menghendaki pornografi sebagai kebebasan.

Ada contoh lain dalam kehidupan yang nyata, yakni kasus beredarnya rekaman video kegiatan seksual dua orang mahasiswa di Bandung. Pelaku mungkin bermaksud merekam dan menyimpannya sebagai kenangan pribadi. Terlepas apakah perekaman ini disengaja oleh pelaku, atau "*hidden camera*", yang jelas aktor dalam video porno mendapati diri mereka sebagai korban. Sanksi sosial demikian berat sampai mereka "kehilangan muka" dan tidak berani melanjutkan kegiatan akademik mereka lagi. Mungkin pada waktu perekaman, mereka menganggap adalah hak mereka untuk melakukan kegiatan pribadi di ruang pribadi. Mereka mungkin tidak menyangka akan terjadi penggandaan dan penyebarluasan hasil rekaman. Siapa yang memperoleh keuntungan dalam kasus ini? Siapa yang dirugikan? Pemerintah belum dapat menjamin hak orang agar tidak dilanggar kelak seandainya pornografi diizinkan. Ada pengecualian untuk mengizinkan konsumsi pornografi asalkan berlangsung secara pribadi, misalnya konsumsi itu mungkin bermanfaat bagi mereka yang memerlukan, seperti para lelaki lemah syahwat. Dalam hal demikian toleransi dapat dipahami. Namun, pada hakikatnya pornografi adalah kekuasaan yang melanggar hak orang yang memang berpotensi dirugikan. Orang-orang yang dirugikan pastilah bukan pornografer. Mereka yang berpotensi dirugikan adalah aktor dalam pornografi—walaupun mungkin mereka tidak menyadari—, konsumen yang belum cukup umur, korban akibat-tidak-langsung ujaran pornografi, kelompok masyarakat yang berpegang pada nilai yang berbeda dari kandungan dan tujuan pornografi, dan bahkan, mungkin ini mengherankan, kelompok penganut nudisme. Kaum nudis justru antipornografi.

Pertentangan pendapat dan sikap terhadap pornografi telah berlangsung dengan pendasaran argumen setiap kelompok. Pada umumnya pemerintah bertahan pada argumen konservatif, dan kaum perempuan sebagai kelompok masyarakat tersisih dalam sistem patriarkis

justru berdiri sama pihak dengan pemerintah. Di pihak lain, para pornografer mempertahankan lahan garapan sumber nafkah mereka dengan dalih kebebasan—kadang-kadang pula menamai produk mereka sebagai karya seni. Konsumen pornografi merasa bahwa mereka mempunyai hak untuk bebas melakukan kegiatan pribadi dalam ruang pribadi, tanpa menyadari kegiatan itu secara inheren merugikan pihak lain dan melanggar hak orang atau kelompok lain.

HAKIKAT PORNOGRAFI: KESIMPULAN

Sebagai hasil pembahasan panjang tentang pornografi, dapat disimpulkan bahwa hakikat pornografi adalah pertunjukan daya kuasa (*power*) yang tidak setara di antara agen komunikasi, di antara produsen, konsumen, model/aktor, kelompok perempuan, dan yang diperempuankan dalam masyarakat. Telaah pornografi seperti yang telah diuraikan terdahulu dimungkinkan dengan menempatkan pornografi dalam sorotan filsafat bahasa dan didapati pornografi sebagai tindak wicara.

Saya bersikap terbuka terhadap pelarangan ataupun pengizinan pornografi. Terserah kepada khalayak pembaca, khususnya masyarakat tempat terselenggaranya pornografi, karena pornografi bersifat kontekstual. Pornografi adalah fenomena masyarakat modern, yang berarti bahwa pornografi bukan hakikat yang harus terdapat dalam kebudayaan. Ada kecurigaan bahwa pornografi merupakan proses dehumanisasi dalam kebudayaan. Pornografi berbeda dari seksualitas. Seksualitas adalah aspek wajar dalam kehidupan manusia yang sehat. Sehat dalam arti biopsikis dan sosial, bahkan dapat mengantarkan pada kehidupan spiritual yang sakral. Pornografi berbeda nyata dari seksualitas atas dasar penghormatan, yakni penghormatan terhadap hak pribadi individu dan penghormatan terhadap sakralitas kegiatan seksual yang dipersepsi sebagai pernyataan kasih sayang.

DAFTAR ACUAN

- Austin, J.L. (1962), *How To Do Things With Words*. London: Oxford University Press.
 Dworkin, R. (1977), *What Rights Do We Have?* Cambridge: Harvard University Press.
 Habermas, J. (1984), *The Theory Of Communicative Action*. Boston: Beacon Press.
 Mustansyir, Rizal (2001), *Filsafat Analitik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.